

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Penerbit Kansius. Yogyakarta
- Berliani, K., Alikodra, H.S., Masy'ud, B., & Kusri, M.D. (2016b). *Social, economy, cultural and community perception on sumatran elephant (Elephas maximus sumatranus) conflict area in Aceh Province*. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Vol. 27, Hal. 170-181
- BPS. 2017. Kabupaten Muna Dalam Angka. Raha. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna.
- Dassir, M. 2012. Dinamika Sistem Tenure dan Formasi Sosial Petani Membangun dan Melestarikan Hutan. Makassar. P3I Cipta Media.
- Emilia & Suwito. 2007. Hutan Adat dan Hutan Desa. Bogor. WG Tenure.
- Suhendar, E. & Winarni. 1998. Petani dan Konflik Agraria. Bandung: Akatiga.
- Faisal, Maskanah S. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Bogor: Pustaka LATIN.
- FAO. (2014, January 22). *Forest Tenure Why asseing forest ownership is important*. Dipetik Juni 11, 2017, dari Food and Agriculture Organization of the Unites Nations: <http://www.fao.org/forestry/tenure/en/>
- FAO. (2011). *Reforming Forest Tenure: Issue, Principle Sand Process*. Rome: FAO.
- Firdaus, AY. 2007. Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia. Jakarta. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis.
- S.; D. I. Abdi; J. Ludin; R. Smith; S. Williams & S. Williams. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. S.N.



Kartika Sari; M.D. Tapilatu; R. Maharani & D.N. Rini. Jakarta. The British Council.

Galudra, G. (2010). *Assessment Dan Analisis Tenurial Untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan, Khususnya Bagi KPH Dalam Konteks REDD*. Bogor: CIFOR

Hafrida, Haryadi, Taufik Yahya, Retno Kusniati, Isran Idris. 2014. *Penyuluhan Hukum Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Di Kabupaten Batanghari*. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* Vol. 29, No 4.

Hamid, R. 2011. *Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan Pasca Kegiatan HPH PT. Siak Raya Timber di Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau*. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 5 No. 2; 130 – 148

Handoyo, Suka AP, Ginoga KL. 2011. *Identifikasi Tenurial sebagai Prakondisi Untuk Implementasi REDD+*. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*. 8 (4):306-320.

Hendricks, W. 1996. *Bagaimana Mengelola Konflik*. A. Santoso (Penterjemah). Bumi Aksara. Jakarta. Terjemahan

Iskandar, J., 1992. *Ekologi Perdagangan di Indonesia, Studi Kasus Dari Daerah Badui Selatan, Jawa Barat*. Pernerit Jamban, Jakarta.

Kadir, A. (2005). *Pengembangan sosial forestry di SPUC Barisallo: Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat*. *Info Sosial Ekonomi* Vol. 5 Hal. 297-309

Kadir, A., Nurhaedah, & Purwanti, R. (2013). *Konflik pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya penyelesaiannya*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10 Hal. 186-198

Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung



Malik I, Wijardjo B, Fauzi N, Royo A. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam. Jakarta (ID): Yayasan Kemala

Marinus Kristiadi Harun & Hariyatno Dwiprabowo. 2014 Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 11 No. 4.

Mubyarto, Loekman S., 1992. Desa dan Perhutanan Sosial, Kajian Sosial Antropologi di Propinsi Jambi. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.

Ngadiono. 2004. 35 Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia, Refleksi dan Prospek. Yayasan Adi Sanggoro. Bogor.

Poloma, Margaret M. 2010. Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prakoso, Muhammad, 1995. Rencana Kebijakan Kehutanan, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.

Rianti, A., R. Garsetiasih. 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Gangguan Gajah Sumatera di Kabupaten Ogah Kemering Elir*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14 No. 2

Ritzer G dan Douglas JG. 2010. Teori Sosiologi Modern Ed.6 Jakarta: Kencana Prenada Media.

Rusdianto, E. 2016. <http://www.mongabay.co.id/2016/04/12/hutan-jati-muna-tinggal-kenangan/>. Diakses tanggal 15 Agustus 2017.

Tadjudin, D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Bogor. Pustaka LATIN

Sejati, W.K., H. Supriadi. 2015. *Kelembagaan Agribisnis pada Desa Berbasis komoditas Pertanian*.

..., Edward, Sambas, Basuni, & Rineso, Soekmadi. (2010). Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondama. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.



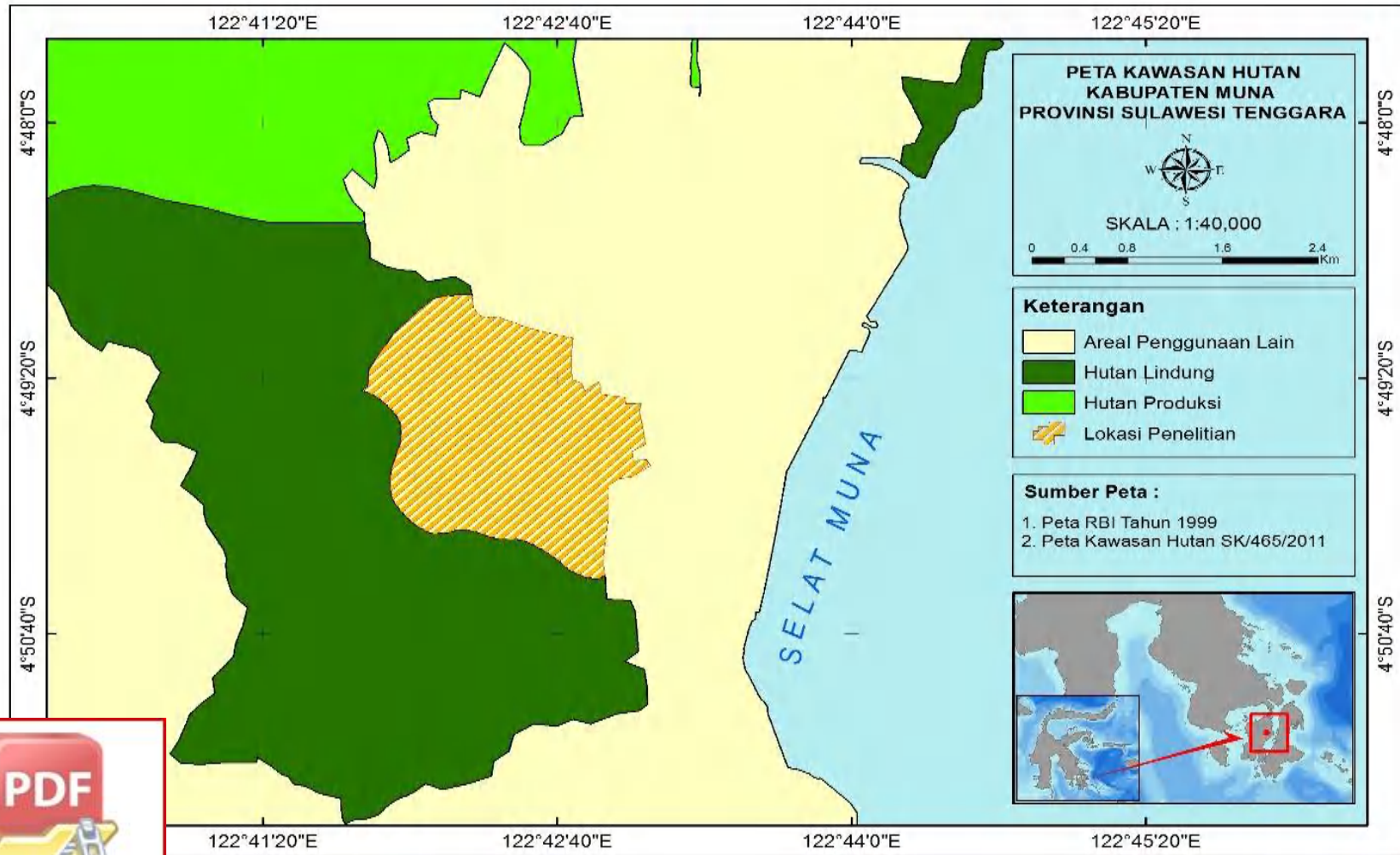
- Soemarwoto, O., Suryani, M., Yatim, W., 1992. Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, Manfaat dan Kebijakannya. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Simon H. 1994, Merencanakan Pembangunan Hutan Untuk Strategi Kehutanan Sosial. Yayasan Pusat Studi Sumberdaya Hutan, Yogyakarta.
- Sumanto, SE. 2009. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 6(1): 13-25
- Sumedi, N., Simon, H., 2000. Hutan dan Masyarakat: Dalam Perspektif Sosiologis Kehutanan. Balai Penelitian Kehutanan, Ujung Pandang
- Susilowati. 2015. Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646 Edisi 3 Januari-Juni 2015.
- Syukur M. 2012. Resolusi Konflik di KPH (Pembelajaran dari KPH Register 47 & Rinjani Barat). Bogor (ID). Working Group Tenure.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, 2011, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiharta, M.D., Maryono, K., Sudaryaputra, A.S., Setiawati, I., Pasomba, K., Riyatmo, S.K., Poniran, S., Santoso, B.I., Maskar, U.W., Kosasi. S,



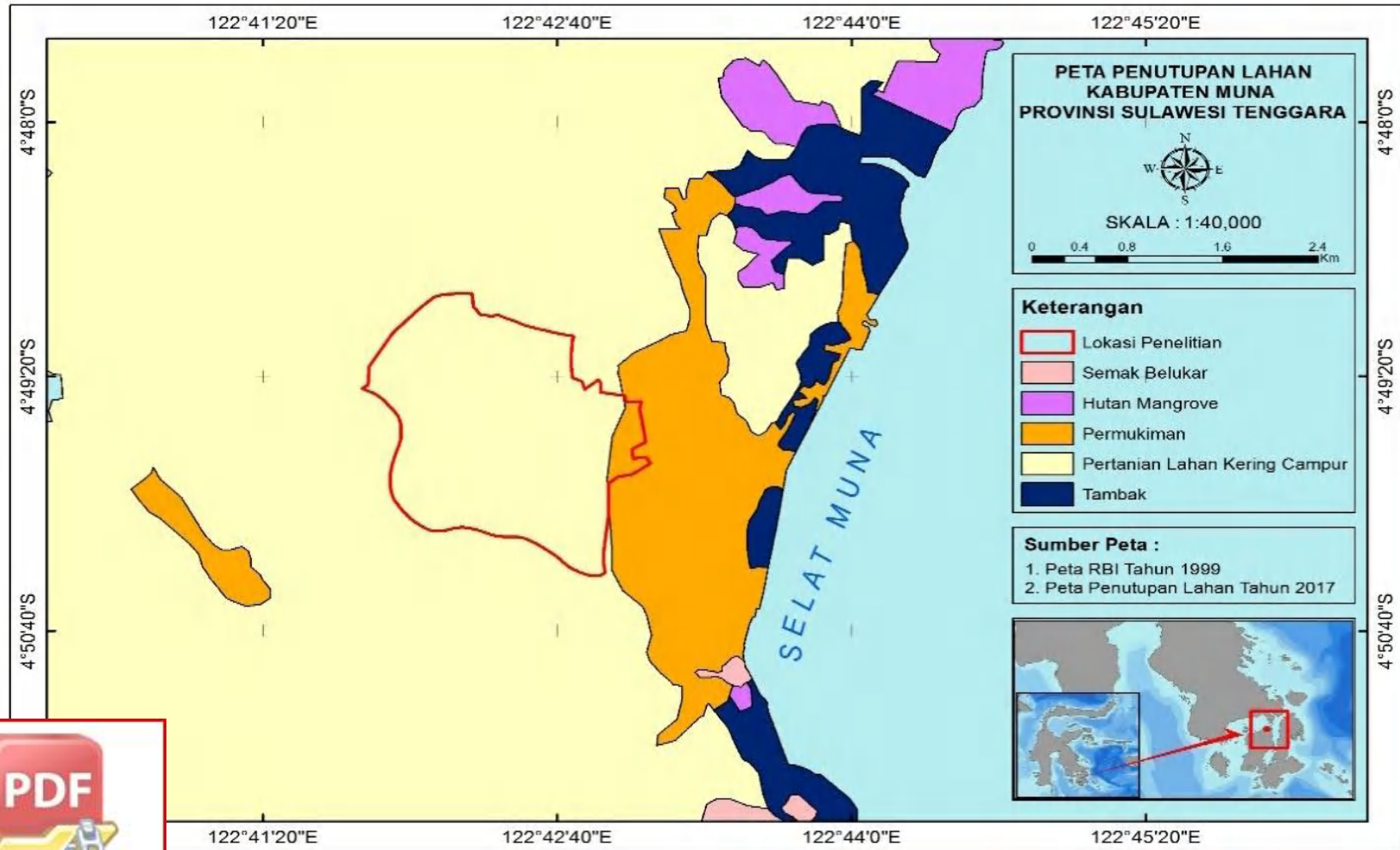
LAMPIRAN



Lampiran 1. Peta Kawasan Hutan Lindung Jompi



Lampiran 2. Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lindung Jompi



Lampiran 3. Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala KPHL Pulau Muna



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat





Wawancara dengan masyarakat Kontu



Sumber : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)



Sumber : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Pengusuran Lahan oleh Dinas Kehutanan Pada tanggal 6 januari



Sumber : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Masyarakat berkumpul pada malam tanggal 6 januari 2003



No	Nama	Umur (tahun)	Pendidikan	Jumlah Tanggung	Luas Lahan dalam Kawasan (Ha)	Pekerjaan	Bentuk Pemanfaatan	Status Kawasan	
								Milik Negara	Milik Rakyat
1	La Ode Ndailesa	47	SMA	3	0.5	Ojek	Kebun	√	
							Kebun		
2	Jumerda	38	Sarjana	3	0.5 dan 1	Honoror	Kebun	√	
							Kebun		
3	Yosep	56	SMP	3	0.5	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
4	La Ode Djaba	62	SMP	2	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
5	La Ode Suleman	70	SD	1	0.5	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
6	La Ode Taminu	70	SMP	1	0.5	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
7	La Daine	60	SMA	4	0.5	Pensiunan PNS	Kebun	√	
		57	SD	4	0.5	Satpam	Kebun	√	
							Kebun		
		43	SMA	3	0.5	Petani	Kebun	√	



No	Nama	Umur (tahun)	Pendidikan	Jumlah Tanggung	Luas Lahan dalam Kawasan (Ha)	Pekerjaan	Bentuk Pemanfaatan	Status Kawasan	
								Milik Negara	Milik Rakyat
							Kebun		
10	La Ode Doode	73	SD	3	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
11	La Kolo	59	SMA	3	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
12	La Jafar	68	SD	4	0.5	Petani	Kebun	√	
13	La Pata	57	SD	3	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
14	La Bawaeang	55	SD	2	1	Petani	Kebun	√	
15	La Ode Bay	67	Sarjana	3	1	Pensiunan Guru	Kebun	√	
							Kebun		
16	La Karimu	60	SD	5	1	Petani dan Buruh Bangunan	Kebun	√	
							Kebun		
		50	SD	3	0.5	Petani	Kebun	√	



No	Nama	Umur (tahun)	Pendidikan	Jumlah Tanggung	Luas Lahan dalam Kawasan (Ha)	Pekerjaan	Bentuk Pemanfaatan	Status Kawasan	
								Milik Negara	Milik Rakyat
18	La Moto	68			1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
19	La Ramli	52	SMP	1	0.5	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
20	La Bani	57	SD	2	0.5	Petani	Kebun	√	
21	La Ode Hamadi	50	SD	3	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
22	La Sariki	61	SD	4	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
23	La Sunudi	48	SMA	3	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
24	La Bunta	52	SD	2	0.5	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
25	La Mana	57	SD	4	1	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
		60	SD	2	1	Petani	Kebun	√	



No	Nama	Umur (tahun)	Pendidikan	Jumlah Tanggung	Luas Lahan dalam Kawasan (Ha)	Pekerjaan	Bentuk Pemanfaatan	Status Kawasan	
								Milik Negara	Milik Rakyat
27	La Wai	56	SD	3	1	Petani dan Buruh Bangunan	Kebun	√	
28	Siti Aisyah	45	S1	2	1	Petani danPedagang	Kebun	√	
29	La Muhamad	48	SMA	2	1	Petani dan Pedagang	Kebun	√	
							Kebun		
30	La Panda	60	SMA	1	0.5	Petani	Kebun	√	
							Kebun		
31	La Ode Gala	56	SD	2	1	Petani	Kebun	√	



Lampiran 4. Kuesioner Penelitian

Panduan Pertanyaan Untuk Masyarakat

I. Karakteristik Responden

Hari/ Tanggal Wawancara :
 Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan terakhir :
 Pendapatan per bulan :
 Jumlah tanggungan dalam keluarga :

1. Sebelum menetap disini, anda berasal dari daerah mana?
2. Sudah berapa lama anda menetap disini?
3. Berapa jumlah anggota keluarga anda?
4. Apakah anda memiliki lahan di areal ini? Bila ada, berapa luas lahan yang anda miliki?
5. Berapa jarak tempat tinggal anda dari hutan?
6. Apakah pekerjaan utama anda?
7. Berapa besar pendapatan pekerjaan utama anda per bulan? Sebutkan!
8. Apakah anda memiliki pekerjaan sampingan? Bila ada sebutkan!
9. Berapa pendapatan dari pekerjaan sampingan anda per bulan!
10. Berapa kali dalam seminggu anda masuk ke hutan? Tiap kali masuk berapa lama anda menghabiskan waktu di dalam hutan? Apa yang anda lakukan di dalam hutan? Berapa jauh lokasi anda beraktifitas di dalam hutan dari tempat tinggal anda? Bagaimana akses menuju tempat aktifitas anda di dalam hutan?
11. Apakah anda juga mengambil hasil-hasil hutan tertentu? Jika ya sebutkan dan berapa banyak jumlah yang anda ambil setiap harinya? apakah hasil hutan yang anda ambil itu digunakan untuk kepentingan konsumsi atau dijual?

II. Persepsi Masyarakat Kontu Terhadap Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Lindung

1. Menurut anda kawasan tempat anda tinggal saat ini adalah milik siapa?

anda memiliki hak atas kawasan tersebut?

hak apa yang dimiliki oleh masyarakat?

apa masyarakat merasa mempunyai hak?

ok, apa alasannya?



6. Apakah anda memiliki kewajiban atas kawasan tersebut?
7. Jika ya, apa saja bentuk kewajiban itu?
8. Mengapa anda merasa mempunyai kewajiban itu?

III. Persepsi Masyarakat Kontu Terkait Konflik di Kawasan Hutan Lindung

1. Apakah anda mengetahui jika Hutan Jompi adalah kawasan hutan lindung?
2. Apakah anda tahu bahwa kawasan ini telah ditunjuk sebagai kawasan lindung?
3. Dari mana anda mengetahui hal tersebut?
4. Apakah masyarakat diinformasikan lebih awal tentang penunjukan status baru kawasan tersebut?
5. Apakah ada konflik yang terjadi di kawasan hutan lindung?
6. Jika ada, konflik apa yang terjadi?
7. Jika pernah terjadi konflik, apakah sudah ada jalan penyelesaiannya?
8. Apakah anda setuju bila kawasan Hutan Lindung Jompi dikelola dengan baik dan masyarakat sekitar hutan diberikan peran?
9. Bila anda setuju apakah anda akan berpartisipasi dengan aktif?
10. Apakah telah terjalin koordinasi antara Pemda, Dishut, dan masyarakat?
11. Apakah anda memiliki harapan terkait pengelolaan kawasan Hutan Lindung Jompi?

IV. Persepsi Masyarakat Kontu Terkait Potensi Konflik dan Sumber Konflik

1. Apa yang melatarbelakangi bahwa kawasan Kontu merupakan warisan leluhur anda?
2. Menurut anda apa bukti bahwa Kawasan Kontu merupakan warisan leluhur anda?
3. Apa reaksi dari pemerintah setelah mendengar Kawasan Kontu merupakan warisan dari leluhur anda?
4. Apakah yang menjadi permasalahan utama terkait konflik ini menurut anda?
5. Jelaskan kronologis sejarah permasalahan tersebut!
6. Bagaimana perkembangan terakhir dari permasalahan itu?
7. Menurut anda bagaimana penyelesaian terbaik atas permasalahan ini?

V. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan



anda apakah kondisi hutan saat ini masih cukup baik?
 anda apakah hutan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat?
 masyarakat mempunyai kepentingan terhadap sumberdaya hutan?
 , sebutkan!

5. Apabila sumberdaya hutan kualitasnya menurun akan berdampak terhadap masyarakat?
6. Bila ada, apa saja dampaknya?
7. Bila hutan rusak siapakah yang paling dirugikan?
8. Berapa sering dalam (sehari/seminggu/sebulan)melakukan kegiatan mengambil kayu bakar, berladang dan berternak?

Panduan Pertanyaan Umum Untuk Tokoh Masyarakat

Hari/ Tanggal Wawancara :
 Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam penetapan status Kawasan Hutan Lindung oleh pemerintah?
2. Apa yang anda ketahui tentang konflik?
3. Apakah dalam masyarakat pernah terjadi konflik?
4. Apakah tanah warisan leluhur pada kawasan hutan lindung menjadi rebutan masyarakat yang ingin memanfaatkannya?
5. Bagaimana pengambilan tanah warisan leluhur tersebut terjadi?
6. Apakah anda tahu tentang pendudukan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kontu?
7. Apakah anda atau pernah terlibat langsung dengan konflik atau perlawanan di kawasan tersebut?
8. Apakah lahan yang dimiliki oleh masyarakat hutan Kontu memiliki status kepemilikan yang legal?
9. Menurut anda apa yang melatarbelakangi pendudukan lahan oleh masyarakat?

Panduan Pertanyaan Umum Untuk Petugas atau Pejabat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Kecamatan

1. Apakah ada bentuk sosialisasi awal kepada masyarakat sebelum penetapan kawasan hutan lindung?
 , bagaimana respon masyarakat terhadap aturan itu?
 dengan adanya aturan itu menyebabkan konflik antara masyarakat pemerintah?
 , berapa lama konflik ini berlangsung?



5. Bagaimana tanggapan anda terhadap konflik tersebut?
6. Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut?
7. Menurut anda, apakah masyarakat mampu mengelola sumber daya hutan dengan baik? Mengapa?
8. Bagaimana pandangan anda terhadap hutan?
9. Adakah pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik ini?
10. Bila ada menurut anda apa pengaruh adanya pihak-pihak tersebut terhadap konflik?
11. Bagaimana pandangan anda terhadap perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat?
12. Apa yang masyarakat lakukan untuk mendapatkan kembali akses terhadap hutan?
13. Bagaimana pemerintah (pemda dan dishut) mengatasinya?

